

Penguatan Wawasan Moderasi Beragama Bagi Guru Madrasah Aliyah Berbasis Pesantren di Kabupaten Pangandaran

Heri Gunawan¹, Heri Hidayat²

¹Pendidikan Bahasa, Tadris Bahasa Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

heri.gunawan@uinsgd.ac.id, heri.hidayat@uinsgd.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: Januari 2025

Direvisi: Juli 2025

Diterbitkan: September 2025

Keywords:

Religious Moderation
Madrasah Aliyah
CBPR
Islamic Boarding Schools
Diversity

ABSTRACT

Indonesia is a country with extraordinary diversity (megadiversity) that includes ethnic groups, languages, and religions. This diversity is a gift from God that must be preserved in order to achieve national unity and integrity. As an effort to strengthen religious moderation, community service activities are carried out that focus on strengthening the understanding of religious moderation for Madrasah Aliyah teachers based in Islamic boarding schools. The community service program uses the Community-Based Participatory Research (CBPR) method, an approach that emphasizes empowerment, collaboration, and social change by involving the community as partners and agents of change. It was carried out in the Sabilil Muttaqin Islamic boarding school in Pangandaran Regency, involving 50 representative teachers from Islamic high schools based in Islamic boarding schools. This two-day workshop was also supported by the Pangandaran Regency Religious Harmony Forum and various related stakeholders. The results of the activity showed the importance of increasing teachers' knowledge of religious moderation to be integrated into the learning process. Participants were also expected to be able to develop an action plan to convey the values of religious moderation to students, creating a generation that is moderate, tolerant, and harmonious in diversity.

Copyright © 2025 JRCE.

Korespondensi:

Heri Gunawan,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
heri.gunawan@uinsgd.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri dengan penduduk yang sangat beragam (heterogen), bahkan disebut sebagai negara megadiversity karena memiliki kekayaan suku, bahasa, dan agama yang luar biasa. Keragaman ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus dirawat dan dijaga agar menjadi kekuatan bagi persatuan dan kesatuan bangsa [1]. Untuk merawat dan mengelola keragaman tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan sebuah instrumen yang dianggap efektif, yakni moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang mengedepankan prinsip jalan tengah (tawasuth), yaitu cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi adil, seimbang, serta menjauh dari sikap ekstrem dalam menjalankan ajaran agama [2][3][4]. Melalui pendekatan ini, individu diajak untuk memahami dan

mengamalkan ajaran agama secara bijaksana, proporsional, dan tetap relevan dalam kehidupan sosial yang majemuk [5].

Menurut pandangan Kementerian Agama, moderasi beragama menjadi kunci sukses dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, agar tercipta toleransi dan kerukunan baik pada tingkat lokal, nasional maupun global, sehingga dapat menerima dan memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam kedamaian [4]. Moderasi beragama memegang peranan penting sebagai kunci keberhasilan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa [6]. Sikap moderat dalam beragama memungkinkan terciptanya toleransi dan kerukunan, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di ranah nasional dan global [7]. Dengan mengedepankan moderasi beragama, masyarakat diajak untuk menerima perbedaan dengan lapang dada, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, dan hidup berdampingan dalam harmoni [8]. Pendekatan ini menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan sosial yang damai, di mana keberagaman dihargai sebagai kekayaan, bukan sebagai pemicu perpecahan (Minarni, 2021). Moderasi beragama tidak hanya menguatkan hubungan antarmanusia, tetapi juga menjadi landasan penting untuk mewujudkan dunia yang lebih inklusif dan penuh kedamaian [9].

Dewasa ini pembinaan sikap moderasi beragama bagi generasi muda, terutama pelajar tingkat madrasah merupakan hal yang sangat urgen. Hal ini terutama bila dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Puslitbang Kemenag, pusat Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution* (CICSR), Nasaruddin Umar Office, *The Nusa Institute*, Daulat Bangsa, dan *Alvara Research Institute* masih mencatatkan bahwa, Indeks Potensi Radikalisme pada 2022 sebesar 10 % [10].

Terlebih bahwa indeks intoleransi dan radikalisme Jawa Barat sebagaimana dilaoprk oleh kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 68,5 [11]. Padahal Menurut Kesbangpol Jawa Barat (2021) toleransi merupakan prinsip utama dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mempraktekan prinsip-prinsip toleransi kepada sesama, kehidupan bermasyarakat akan terasa lebih terjamin damai dan aman dengan minimnya potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan dikalangan masyarakat. Toleransi menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Nilai-nilai toleransi sangat dibutuhkan sebagai landasan sosial dan jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Isu intoleransi berkembang seiring dengan berjalannya proses demokratisasi di Indonesia. Hal tersebut patut untuk menjadi perhatian semua pihak, semua lapisan masyarakat, terutama kalangan pendidik di satuan pendidikan Islam [12].

Keadaan di atas merupakan suatu hal yang sangat memperihatinkan, dan perlu dicari jalan keluarinya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara menanamkan sikap moserasi beragama sejak dini di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya konkret berupa penguatan sikap moderasi beragama bagi para guru Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren, yang salah satunya dilakukan bagi guru MA di Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten otonomi baru di provinsi Jawa Barat.

Untuk merespons tantangan dalam merawat keragaman dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk, diperlukan langkah konkret yang menyasar kelompok strategis, seperti tenaga pendidik. Salah satu pendekatan yang ditawarkan penulis adalah pelaksanaan *workshop* peningkatan wawasan moderasi beragama bagi guru-guru Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana transformasi nilai-nilai moderasi beragama dari guru kepada peserta didik secara berkelanjutan dalam konteks pendidikan keagamaan melalui tema *"Peningkatan Wawasan Moderasi Beragama bagi Guru Madrasah Aliyah Berbasis Pesantren di Kabupaten Pangandaran;"*.

Berbagai studi dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama melalui kegiatan pengabdian memiliki dampak positif. Rusmiati et al. (2022) menemukan bahwa komunitas pesantren antusias mengikuti program penguatan moderasi beragama yang juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap radikalisme [9]. Sementara itu, Risdianto & Arum (2022) mencatat peningkatan pemahaman dan penerimaan nilai toleransi di masyarakat Mrican melalui pendekatan yang berbasis kutipan-kutipan inspiratif keagamaan [13]. Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis kultural dan pendidikan di akar rumput efektif dalam membumikan moderasi beragama. Berbeda dengan pengabdian sebelumnya yang berfokus pada komunitas pesantren secara umum atau masyarakat kampung, penelitian ini secara spesifik menargetkan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran. Fokus ini memberikan kontribusi baru dari sisi: (1) objek yang lebih terarah—guru PAI seperti Al-Qur'an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI, (2) pendekatan pengabdian yang berbasis pada pendampingan intensif, dan (3) penguatan peran guru sebagai agen moderasi yang strategis dalam lembaga pendidikan formal keagamaan.

Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah, yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter keagamaan peserta didik. Kontribusi ilmiahnya diharapkan berupa model pengabdian

masyarakat yang efektif dalam pengarusutamaan moderasi beragama, sedangkan kontribusi praktisnya adalah peningkatan kapasitas guru sebagai pelaku utama dalam transformasi nilai keagamaan yang toleran, inklusif, dan kontekstual. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi guru-guru PAI di Madrasah Aliyah berbasis pesantren dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Fokus kajian terletak pada strategi penguatan peran guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Unit analisis dalam kegiatan ini adalah guru-guru mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran.

2. METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community-Based Participatory Research* (CBPR), yaitu salah satu bentuk penelitian *kualitatif-deskriptif* yang berakar dari tradisi antropologi partisipatoris. CBPR menempatkan komunitas sebagai subjek aktif dalam proses penelitian dan bertujuan untuk menjawab persoalan yang berasal dari kebutuhan nyata masyarakat. Peneliti bertindak sebagai fasilitator yang menjaga netralitas dan membangun relasi kolaboratif antara akademisi dan komunitas (internal vs eksternal) [14].

Populasi dalam pengabdian ini adalah seluruh Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran. Terdapat tujuh MA yang menjadi populasi, terdiri dari enam MA swasta dan satu MAN, yaitu: (1) MA Sabilul Muttaqien (Kalipucang), (2) MA Al-Furqon (Cimerak), (3) MA YPK (Cijulang), (4) MA YPP (Jamanis), (5) MA As-syifa (Padaherang), (6) MA Mafatihul Huda (Padaherang), (7) MAN 2 Pangandaran (Langkaplancar). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih guru-guru PAI seperti Al-Qur'an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI, sebagai partisipan utama karena mereka merupakan aktor kunci dalam proses transformasi nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan [15].

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) Observasi lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan madrasah, (2) Wawancara mendalam dan melakukan diskusi dengan guru-guru PAI sebagai informan utama, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, dan (3) Dokumentasi, berupa foto kegiatan, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen institusional dari madrasah maupun pesantren. Instrumen yang digunakan mencakup lembar observasi, pedoman wawancara, dan format dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *triangulasi*, yang terdiri dari tiga tahap: (1) Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data sesuai kategori tematik, (2) Penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk naratif dan matriks, dan (3) Penarikan kesimpulan, berdasarkan keterkaitan antara temuan, literatur, dan konteks lokal. Analisis juga disesuaikan dengan prinsip CBPR, yakni mendorong interpretasi data secara kolaboratif bersama komunitas untuk meningkatkan validitas dan relevansi temuan.

Pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik khas sebagai daerah pariwisata dengan tingkat interaksi tinggi, beragam latar belakang keagamaan, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini menjadikan nilai moderasi beragama sebagai kebutuhan mendesak di lingkungan pendidikan berbasis pesantren yang berpotensi bersinggungan langsung dengan realitas pluralisme. Seluruh tahapan metode, mulai dari desain, teknik sampling, pengumpulan data, hingga analisis, disusun secara sistematis dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks lembaga pendidikan keagamaan serupa. Panduan instrumen, pendekatan partisipatoris, dan teknik validasi juga memungkinkan keterulangan secara metodologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

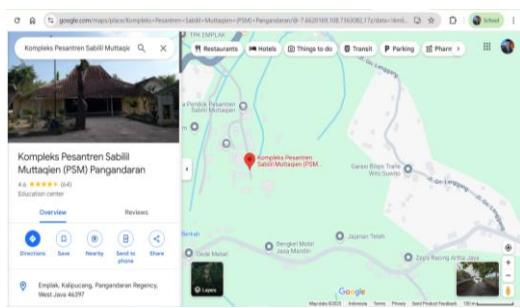
3.1. Demografi Tempat Pelaksanaan Pengabdian

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah otonomi baru (DOB) di selatan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Secara administratif, kabupaten ini terbagi dalam 10 kecamatan dengan luas wilayah sekitar 1.011,04 km² dan jumlah penduduk mencapai sekitar 423.000 jiwa (BPS, 2020). Meskipun dikenal luas sebagai daerah wisata unggulan, Pangandaran juga memiliki potensi strategis dalam bidang pendidikan keagamaan, khususnya melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis pesantren.

Sasaran utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah madrasah aliyah (MA) swasta berbasis pesantren yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Terdapat tujuh MA berbasis pesantren, yakni enam MA swasta dan satu MA Negeri, yaitu: (1) MA Sabilul Muttaqien (Kalipucang), (2) MA Al-Furqon (Cimerak), (3) MA YPK (Cijulang), (4) MA YPP (Jamanis), (5) MA Assyifa (Padaherang), (6) MA

Mafatihul Huda (Padaherang), dan (7) MAN 2 Pangandaran (Langkaplancar). Ketujuh madrasah ini memiliki kekhasan karena tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi juga berintegrasi dengan sistem pembinaan pendidikan keagamaan berbasis pesantren. Dalam konteks Kabupaten Pangandaran sebagai kawasan wisata yang dikunjungi lebih dari 3,8 juta wisatawan setiap tahun (Disbudpar, 2022), lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal yang moderat di tengah potensi infiltrasi budaya luar. Oleh karena itu, penguatan wawasan moderasi beragama di kalangan guru-guru MA berbasis pesantren menjadi langkah strategis untuk memperkuat karakter kebangsaan dan religiusitas peserta didik di wilayah ini.

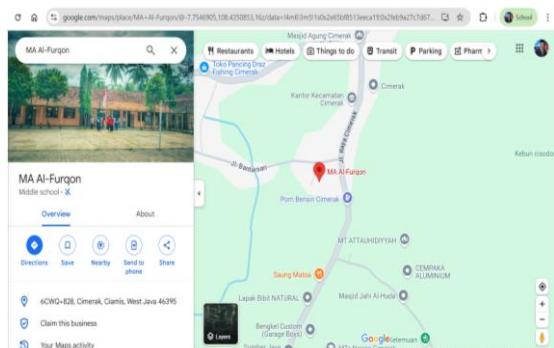
MA Sabilul Muttaqien (Kalipucang)



Untuk melengkapi dan menyempurnakan kemampuan peserta didik (santri). Selain program wajib, pesantren merancang program pilihan intensif dan pengembangan diri yang berorientasi pada pengembangan kemampuan yang spesifik. Program ini disediakan melayani kebutuhan, bakat dan minat santri sehingga semua potensi yang dimiliki setiap individu akan tercover dan terberdayakan dengan program pendidikan pesantren.

Selain menjalankan lembaga pendidikan formal, pesantren Sabilil Muttaqien Pangandaran juga menyelenggarakan program khusus tahlidzul Qur'an dan program lainnya sesuai kebutuhan, seperti program pengembangan diri, di antaranya (1) *Information technology Computer* (ICT), (2) program pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (3) *Public Speaking*, (4) Pramuka dan (5) *Interpreneurship*. Juga terdapat program pengembangan diri optional seperti komputer grafis, internet marketing, fotografi, *web designer*, multimedia, agrobisnis, seni baca tulis Al-Qur'an, kaligrafi, seni musik (*hadroh, nasyid, band*), club olah raga, jurnalistik, paskibr dan teknik *skill* lain sesuai bakat dan minat santri.

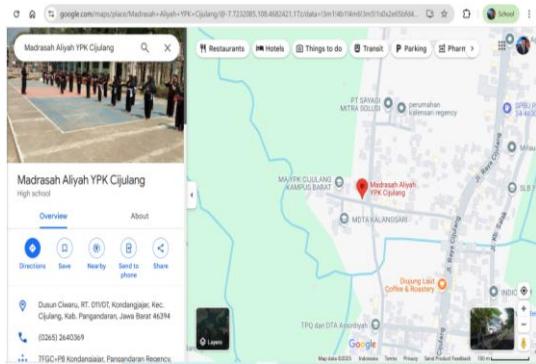
MA Al-Furqon (Cimerak)



Madarsah Aliyah (MA) Al-Furqon merupakan MA yang berdiri di bawah manajemen Pesantren Al-Furqon, dengan sejarah panjang yang tidak bisa terpisahkan. Hadir dari keyakinan dan rasa tanggung jawab akan tuntunan ummat terhadap pejuang dan penerus amanat *nubuwat* (*warasatul anbiyā*). MA Al-Furqon Cimerak Kabupaten Pangandaran memiliki visi "*Menciptakan peserta didik yang beriman, berilmu, berakhhlakul karimah, dan berprestasi dalam berbagai aspek kehidupan*". Berawal pada tahun 2002 di kecamatan Cimerak belum terdapat sekolah jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sehingga jumlah lulusan SLTP/MTs masih sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTA. Berangkat dari kondisi tersebut, tepat pada tanggal 06 Februari tahun 2003, maka dibukalah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dibawah naungan Yayasan Al-Furqon yang diprakarsai oleh KH. Otong Aminudin Chowas. Beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di kabupaten Pangandaran bahkan di kancah nasional. Beliau juga merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Pangandaran. Pada awal berdirinya, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar masih ikut di gedung Madrasah Tsanawiyah Cimerak karena belum memiliki ruangan kelas sendiri. Dari tahun ke tahun, jumlah peserta didik di Madrasah Aliyah A-Furqon Cimerak terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga memerlukan penambahan ruang kelas yang memadai agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren Sabilil Muttaqien mengembangkan model pendidikan kombinatif. Kegiatan pendidikan kepesantrenan, madrasah *mu'allimin* dan pendidikan formal (Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah) terintegrasi menjadikan satu sistem yang saling mendukung dan melengkapi. Ketiga unsur ini disinergikan dari segi kompetensi dan materi dalam tingkat pengetahuan yang berjenjang dalam kerangka pendidikan 6 (enam) tahun. Jadi target pendidikan akan tercapai dengan baik, ketika anak didik telah meyelesaikan pembelajaran di pesantren dalam rentang waktu 6 tahun tersebut.

MA YPK (Cijulang)



Kabupaten Ciamis diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memperoleh Izin Pendirian Madrasah, dengan surat usulan Kandepag Ciamis Nomor: Mi.19/SD.0.30/2092/1983, tanggal 1983.

Pemerintah Kabupaten Ciamis selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 3347/Ks.024/83, tanggal 5 Desember 1983 tentang Pencatatan Administratif berdirinya Madrasah Aliyah kalangsari Desa Kondangajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis. Surat tersebut ditandatangi oleh Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Ciamis, Drs. H. Sinter Sastranegara, atas nama Bupati Kabupaten Ciamis. Sesaat sebelum Agan Didi hijrah ke kompleks kaum Cijulang dan bermukim di sana, sekitar tahun 1968 beliau mewasiatkan kepada salah seorang santri terbaiknya KH. Moch. Tasdiqin untuk melanjutkan kepemimpinan dan pembinaan pondok pesantren, dan KH. Moch. Tasdiqin pun meneruskan kepemimpinan ponpes Kalangsari hingga tahun 1994. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan pondok pesantren, KH. Moch. Tasdiqin dibantu oleh kakak iparnya, yang juga murid terbaik KH. Didi Abdul Madjid yang bernama KH. U Bahrudin dan seorang mantunya yang bernama KH. Moch. Muhsin. Sejak tahun 1994 tampuk pimpinan ponpes Kalangsari dipegang oleh KH. U Bahrudin hingga tahun 2011.

Pada awal kepemimpinan KH. Moch. Tasdiqin, Ponpes Kalangsari sempat memasuki masa keemasannya yang ditandai dengan membludaknya jumlah santri hingga berjumlah di atas seribu orang. Para alumnus ponpes Kalangsari kini banyak bermukim dan menjadi Kiyai di beberapa tempat di wilayah selatan Ciamis, Tasik dan wilayah Pangandaran sebagai pimpinan beberapa pesantren. Akan tetapi masa keemasan berlangsung tidak lama hingga tahun 1972.

Pada musim Pemilu 1972 KH. Moch. Tasdiqin berhasil direkrut oleh para politisi Golkar, sehingga beliau berkecimpung langsung dalam kompanye Golkar pada saat itu. Hal ini pulalah yang menyebabkan para santri ponpes Kalangsari banyak yang memilih untuk meninggalkan pesantren. KH. Moch. Tasdiqin dikaruniai dua orang putri, Nonok Muhayyah dan Iis Mukaromah. Nonok Muhayyah dinikahi oleh KH. Moch. Muhsin yang selanjutnya dikaruniai lima orang putra–putri. Salah seorang putri beliau adalah Ninih Muthmainnah, yang dikenal dengan Teh Ninih yang dinikahi oleh KH Abdullah Gymnastiar atau dikenal dengan nama Aa Gym.

Santri ponpen Kalangsari semakin hari kian berkurang, hingga menjelang tahun 1980 jumlah santri di pesantren ini tinggal beberapa gelintir saja. Maka searah dengan tuntutan masyarakat, pada tahun 1982 berkumpullah tokoh-tokoh masyarakat Cijulang untuk memusyawarahkan pengembangan pendidikan pondok pesantren yang dikolaborasikan dengan sekolah Islam formal. Para tokoh tersebut antara lain, H. Moch. Hayat Arifin, E. Mahpuddin, Drs. Abdul Ghani, KH. Moch. Tasdiqin, KH. Bahruddin, KH. Moch. Muhsin, Drs. Elan Tarlan (Camat Cijulang), dan Drs. M. Yazid (KUA Cijulang).

Berdasarkan hasil musyawarah, dihasilkan kesepakatan untuk didirikan Madrasah Aliyah. Maka mulai tahun pelajaran 1983/1984 Madrasah Aliyah Kalangsari ini mulai menerima pendaftaran siswa baru. Tidak hanya berhenti pada pendirian Madrasah Aliyah, ponpes Kalangsari terinspirasi untuk selanjutnya mendirikan sebuah yayasan untuk mewadahi lembaga pendidikan yang berada di lingkungan ponpes Kalangsari. Pada tahun 1988 telah menghadap ke Notaris: Rodiah Oetomo, SH tokoh-tokoh Cijulang, antara lain, (1) KH. Moch. Tasdiqin, selaku sesepuh Ponpes Kalangsari Cijulang, (2) Abdul Manap, B.A., selaku guru MTs Cijulang, (3) Ajengan Bahrudin, selaku pengasuh Ponpes Kalangsari Cijulang, (4) Ajengan Moch. Muhsin, selaku pembina Ponpen Kalangsari Cijulang, dan (5) Ukan Sukandi, selaku Kepala Desa Kondangajar Cijulang. Atas usulan tokoh-tokoh tersebut maka berdirilah Yayasan Pendidikan Kalangsari (YPK), dengan akta notaris tanggal 8 April 1988, Nomor: 11. Tercatat di Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 11 April 1988, Nomor: 4/1988.

MA YPP (Jamanis)

Penguatan Wawasan Moderasi Beragama Bagi Guru Madrasah Aliyah Berbasis Pesantren di Kabupaten Pangandaran (Heri Gunawan)

Madrasah Aliyah (MA) YPK Cijulang, atau lebih dikenal MA Cijulang, lahir pada tanggal 15 Juli 1983 di Pondok Pesantren Kalangsari Cijulang Kabupaten Pangandaran (yang pada awalnya termasuk Kabupaten Ciamis). Ponpes Kalangsari Cijulang merupakan pondok pesantren tertua di Pangandaran dan Tasik Selatan. Didirikan pada tahun 1938 oleh seorang Kiyai Kharismatik bernama KH. R. Didi Abdul Madjid, atau di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan Agan Didi.

Madrasah Aliyah YPK Cijulang didirikan mengacu pada Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis, Nomor: Mi.19/MA.02.03/465/1983, tanggal 15 Juli 1983. Selanjutnya oleh Kantor Depag Kabupaten Ciamis diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memperoleh Izin Pendirian Madrasah, dengan surat usulan Kandepag Ciamis Nomor: Mi.19/SD.0.30/2092/1983, tanggal 1983.

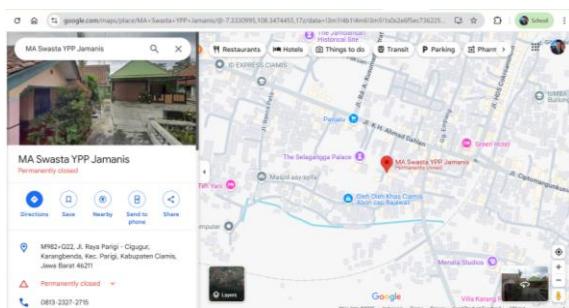
Pemerintah Kabupaten Ciamis selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 3347/Ks.024/83, tanggal 5 Desember 1983 tentang Pencatatan Administratif berdirinya Madrasah Aliyah kalangsari Desa Kondangajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis. Surat tersebut ditandatangi oleh Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Ciamis, Drs. H. Sinter Sastranegara, atas nama Bupati Kabupaten Ciamis. Sesaat sebelum Agan Didi hijrah ke kompleks kaum Cijulang dan bermukim di sana, sekitar tahun 1968 beliau mewasiatkan kepada salah seorang santri terbaiknya KH. Moch. Tasdiqin untuk melanjutkan kepemimpinan dan pembinaan pondok pesantren, dan KH. Moch. Tasdiqin pun meneruskan kepemimpinan ponpes Kalangsari hingga tahun 1994. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan pondok pesantren, KH. Moch. Tasdiqin dibantu oleh kakak iparnya, yang juga murid terbaik KH. Didi Abdul Madjid yang bernama KH. U Bahrudin dan seorang mantunya yang bernama KH. Moch. Muhsin. Sejak tahun 1994 tampuk pimpinan ponpes Kalangsari dipegang oleh KH. U Bahrudin hingga tahun 2011.

Pada awal kepemimpinan KH. Moch. Tasdiqin, Ponpes Kalangsari sempat memasuki masa keemasannya yang ditandai dengan membludaknya jumlah santri hingga berjumlah di atas seribu orang. Para alumnus ponpes Kalangsari kini banyak bermukim dan menjadi Kiyai di beberapa tempat di wilayah selatan Ciamis, Tasik dan wilayah Pangandaran sebagai pimpinan beberapa pesantren. Akan tetapi masa keemasan berlangsung tidak lama hingga tahun 1972.

Pada musim Pemilu 1972 KH. Moch. Tasdiqin berhasil direkrut oleh para politisi Golkar, sehingga beliau berkecimpung langsung dalam kompanye Golkar pada saat itu. Hal ini pulalah yang menyebabkan para santri ponpes Kalangsari banyak yang memilih untuk meninggalkan pesantren. KH. Moch. Tasdiqin dikaruniai dua orang putri, Nonok Muhayyah dan Iis Mukaromah. Nonok Muhayyah dinikahi oleh KH. Moch. Muhsin yang selanjutnya dikaruniai lima orang putra–putri. Salah seorang putri beliau adalah Ninih Muthmainnah, yang dikenal dengan Teh Ninih yang dinikahi oleh KH Abdullah Gymnastiar atau dikenal dengan nama Aa Gym.

Santri ponpen Kalangsari semakin hari kian berkurang, hingga menjelang tahun 1980 jumlah santri di pesantren ini tinggal beberapa gelintir saja. Maka searah dengan tuntutan masyarakat, pada tahun 1982 berkumpullah tokoh-tokoh masyarakat Cijulang untuk memusyawarahkan pengembangan pendidikan pondok pesantren yang dikolaborasikan dengan sekolah Islam formal. Para tokoh tersebut antara lain, H. Moch. Hayat Arifin, E. Mahpuddin, Drs. Abdul Ghani, KH. Moch. Tasdiqin, KH. Bahruddin, KH. Moch. Muhsin, Drs. Elan Tarlan (Camat Cijulang), dan Drs. M. Yazid (KUA Cijulang).

Berdasarkan hasil musyawarah, dihasilkan kesepakatan untuk didirikan Madrasah Aliyah. Maka mulai tahun pelajaran 1983/1984 Madrasah Aliyah Kalangsari ini mulai menerima pendaftaran siswa baru. Tidak hanya berhenti pada pendirian Madrasah Aliyah, ponpes Kalangsari terinspirasi untuk selanjutnya mendirikan sebuah yayasan untuk mewadahi lembaga pendidikan yang berada di lingkungan ponpes Kalangsari. Pada tahun 1988 telah menghadap ke Notaris: Rodiah Oetomo, SH tokoh-tokoh Cijulang, antara lain, (1) KH. Moch. Tasdiqin, selaku sesepuh Ponpes Kalangsari Cijulang, (2) Abdul Manap, B.A., selaku guru MTs Cijulang, (3) Ajengan Bahrudin, selaku pengasuh Ponpes Kalangsari Cijulang, (4) Ajengan Moch. Muhsin, selaku pembina Ponpen Kalangsari Cijulang, dan (5) Ukan Sukandi, selaku Kepala Desa Kondangajar Cijulang. Atas usulan tokoh-tokoh tersebut maka berdirilah Yayasan Pendidikan Kalangsari (YPK), dengan akta notaris tanggal 8 April 1988, Nomor: 11. Tercatat di Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 11 April 1988, Nomor: 4/1988.



Madrasah Aliyah YPP (MA-YPP) Babakan Jamanis Parigi didirikan pada tahun 1984 berlokasi di Pondok Pesantren Babakan Jamanis, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, dengan jarak kepusat kecamatan kurang lebih 4 KM, dengan jarak ke pusat kabupaten 1 KM yaitu Kabupaten Pangandaran.

MA-YPP Babakan Jamanis Parigi merupakan salah satu satuan lembaga pendidikan yang menjadi bagian penting dalam program pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan dan perkembangan suatu Negara. Pembangunan dan peningkatan kualitasnya menjadi tanggung jawab Negara dan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dimana arah kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat menentukan kemajuan dan kemunduran daerahnya, setiap individu perlu selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik untuk hal formal maupun tidak formal agar tidak kalah bersaing dalam masyarakat yang semakin kompleks.

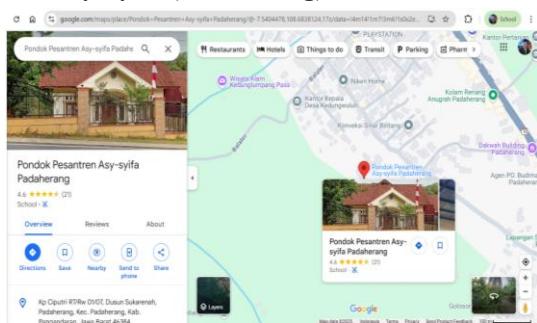
Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi yang sangat besar dalam menyongsong era global. Suatu bangsa atau Negara bisa dikatakan cerdas jika terdiri dari masyarakat yang individu-individunya mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, dengan kata lain mempunyai sumberdaya manusia yang tinggi. Sebagai salah satu pilar pengembangan sumberdaya manusia, madrasah mempunyai peran yang sangat strategis.

Pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal di Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu implementasi dari gambaran uraian di atas. Kabupaten Pangandaran menyikapi hal tersebut, sejalan dengan adanya jenis dan tingkat lembaga pendidikan yang lengkap, yaitu dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi.

MA-YPP Babakan Jamanis Parigi Kabupaten Pangandaran terletak disebelah selatan Pulau Jawa. Wilayahnya termasuk ke dalam Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan tidak jauh dari Pesisir Pantai Bojongsalawe dan Batuhiu. Daerah ini dikenal sebagai kawasan wisata pantai selatan merupakan perairan laut di pantai selatan Pulau Jawa. Sebagian kawasan tersebut sudah terkenal sejak lama dan dikembangkan sebagai obyek rekreasi dan pariwisata.

Pantai Bojongsalawe dan Batuhiu merupakan tempat wisata. Pariwisata pantai ini termasuk ke dalam tempat wisata yang terkenal oleh wisatawan mancanegara. Di pantai ini terdapat sarana pelestarian penyu sisik yang saat ini jumlahnya sudah sedikit sehingga dilindungi. Masyarakat sekitar MA-YPP Babakan Jamanis sebagian besar berasal penduduk asli dan pendatang. Lingkungan pendidikan MA-YPP Babakan Jamanis Parigi berada dalam satu komplek dengan Pondok Pesantren. Hal ini untuk memberikan warna khas yang dipengaruhi oleh suasana Religius dan kebersamaan. MA YPP Babakan Jamanis berada dilingkungan Pesantren Babakan Jamanis yang berdiri di atas tanah milik YPP yang keseluruhannya mencapai 3,080 M² dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

MA Asy-Syifa (Padaherang)



Madrasah Aliyah (MA) Asy-Syifa merupakan lembaga pendidikan formal berada di bawah pesantren Asy-Syifa, yang merupakan salah satu pondok pesantren unggulan yang ada di wilayah pangandaran, yang mana wilayah tersebut pada awalnya masuk dalam wilayah administrasi Ciamis sebelum adanya daerah otonomi baru (DOB).

Pesantren Asy-Syifa merupakan pesantren yang cukup unik dibanding pesantren lainnya. Kenapa dibilang cukup unik? Karena pesantren tersebut mengintegrasikan antara kurikulum pesantren salafiyah

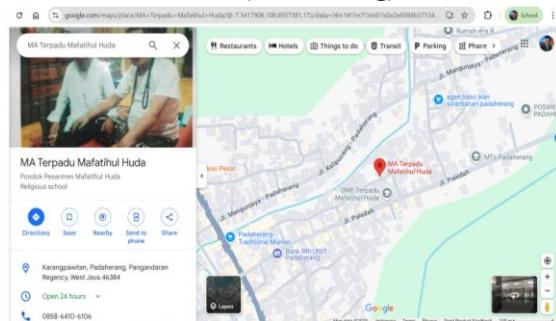
yang mengkaji kitab klasik/kitab kuning dengan kurikulum pesantren modern yang menekankan kepada penggunaan dua bahasa unggulan, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan demikian, pesantren Asy-Syifa menerapkan tiga kurikulum sekaligus, yakni kurikulum Kementerian Agama RI, kurikulum pesantren modern, dan kurikulum pesantren salafiyah.

Selain itu, pesantren Asy-Syifa juga menekankan pada penguasaan Al-Qur'an dalam hal pemahaman dan hafalan. Santri baik jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA) diharuskan

untuk menghafal ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an untuk pemahaman dan penguatan dalil-dalil Al-Qur'an secara tematik.

Pesantren yang dipimpin oleh KH. Makbulaeni ini telah menorehkan banyak prestasi. Puluhan piala telah berhasil dikumpulkan dari berbagai ajang perlombaan dan kompetensi. Baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan mengambil segmen pesantren "ramah." Asy-Syifa telah menerima para santri dari kalangan yatim piatu dan *dhuafa*. Tapi terlepas dari kondisi tersebut, di tengah keterbatasan yang ada, Asy-Syifa terus menorehkan prestasi dan terus bangkit mengharumkan nama daerah, dan tentunya mencetak generasi *robbani* yang mumpuni di dalam segala bidang.

MA Mafatihul Huda (Padaherang)

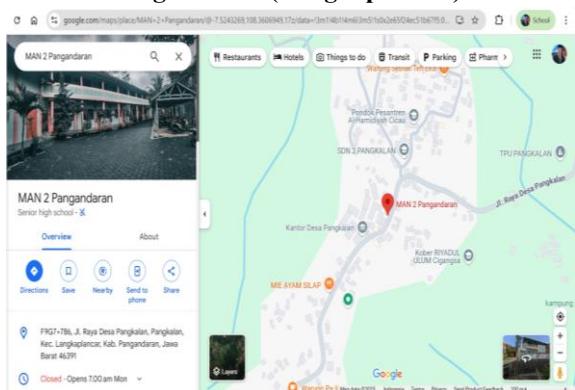


kurikulum belajar. MA Mafatihul Huda ditangani oleh seorang operator yang bernama Adi Suryana.

MA Mafatihul Huda merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang menengah atas yang berlokasi di Desa Karang pawitan, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, MA Mafatihul Huda berada di bawah naungan Kementerian Agama.

MA Mafatihul Huda memulai kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran mulai tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan, Kw.10.4/4/PP.00.6/108/2008, pada waktu ini MA Terpadu Mafatihul Huda masih menggunakan program

MAN 2 Pangandaran (Langkaplancar)



Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pangandaran pada awalnya adalah Madrasah Aliyah Swasta dengan nama Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Al-Hamidiyah, yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1988 dan diresmikan pada tanggal 24 Juli 1988 oleh Drs. H. O. Djakaria selaku Kepala Kantor Depatemen Agama Kabupaten Ciamis (sebelum berdiri Kabupaten Pangandaran). MANU lahir dari "Rahim" Yayasan Pesantren Al-Hamidiyah dalam rangka memperluas lembaga pendidikan di Pesantren Al-Hamidiyah.

Pesantren Al-Hamidiyah yang pada mulanya dinamai pesantren Pangkalan merupakan salah satu pesantren besar di Kabupaten pangandaran, berdiri sejak tahun 1920-an, dengan nama pendiri KH. Abdul Hamid, yang merupakan seorang Kiyai karismatik yang disegani bukan hanya oleh masyarakat Langkaplancar, tetapi juga masyarakat Jawa Barat. Beliau adalah salah seorang yang memimpin pergerakan dalam melawan penjajahan belajar dibawah barisan *Hizbulah*. KH. Abdul Hamid sering melakukan riyadah di sebuah gunung yang disebut dengan gunung kutu. Setelah beliau wafat tahun 1948. Setelah K. H. Abdul Hamid wafat, sebagai bentuk *tabaruk* dan *tafa'ul* kepada pendiri pesantren, maka nama pesantren Pangkalan diganti namanya menjadi pesantren Al-Hamidiyah. Kepemimpinan pesantren Al-Hamidiyah diteruskan oleh KH. Anwar Sanusi yang tiada lain merupakan adik kandungnya, hal tersebut karena anak-anaknya belum ada yang dewasa.

Kembali pada sejarah singkat MAN 2 Pangandaran, bahwa setelah berjalan selama kurang lebih 9 tahun MANU Al-Hamidiyah berubah status menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pangkalan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1997. Dengan adanya perubahan status ini mempunyai dampak sangat positif terhadap perkembangan lembaga. Secara berangsur-angsur MAN Pangkalan berusaha meningkatkan diri baik pengembangan fisik/sarana prasarana maupun non fisik/akademik. Kemudian pada tahun 2015 MAN Pangkalan berubah nama menjadi MAN 2 Pangandaran berdasarkan SK Menteri Agama RI., Nomor 212 Tahun 2015 tentang perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Barat.

3.1. Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Community-Based Participatory Research* (CBPR), yang menekankan kemitraan antara akademisi dan komunitas sebagai subjek aktif. Kegiatan dilakukan dalam bentuk partisipatif dan kolaboratif untuk merespons kebutuhan nyata komunitas,

dalam hal ini para guru Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tahapan Perencanaan

Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu melakukan perecanaan yang matang. Perencanaan dimulai dengan mengajukan proposal kegiatan pengabdian ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, setelah melalui *review* proposal dan penandatangan kontrak pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, melaksanakan *survey* (studi pendahuluan) ke lokasi yang akan dijadikan lokasi pengabdian kepada masyarakat, meluncurkan koordinasi ke Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Madrasah MA (KKM-MA) yang ketuanya berada di MAN 1 Pangandaran.

Setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, akhirnya disepakati bahwa kegiatan pengabdian dikerjasamakan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pangandaran, dengan alasan bahwa kegiatan pembinaan moderasi beragama juga merupakan “agenda” kerja FKUB Kabupaten Pangandaran, oleh karena itu gayung bersambut, kemudian disepakati untuk melakukan perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) atau PKS antara LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FKUB dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. PKS ini kemudian dimatangkan dalam surat PKS Nomor: B-1490/Un.05/V.2/PP.06/08/2023 dan Nomor: 007/FKUB-Pnd/KS.01/VIII/2023.

Setelah disepakati kerjasama kegiatan, kemudian dibicarakan juga kerjasama lokasi kegiatan. Setelah melalui diskusi panjang dengan pihak FKUB, KKM-MA dan juga dari pihak Penmad Kemenag Kabupaten Pangandaran, disepakati tempat pelaksanaan kegiatan di Pesantren Sabilil Muttaqien Kabupaten Pangandaran. Setelah melalui diskusi dengan pihak Sabilill Muttaqie, kemudian di kuatkan dengan surat PKS antara LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan PSM Sabilil Muttaqien Kabupaten Pangandaran dengan Nomor: B-1491/Un.05/V.2/PP.6/08/2023 dan Nomor: 008/YPI-PSM/ VIII/2023.

PKS menjadi dasar kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan berkerjasama sama dengan FKUB dan pesantren Sabilil Muttaqin Kabupaten Pangandaran. Adapun dipilihnya PSM Sabilil Muttaqin Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi kegiatan atas beberapa pertimbangan, di antaranya: (1) secara geografis pesantren mudah dijangkau oleh peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah lain, karena lokasinya berada di tengah-tengah, (2) mudah dijangkau oleh kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, karena pesantren PSM berada didekat jalan raya provinsi, yang menghubungkan ke Pantai Pangandaran, (3) pesantren memiliki tempat yang cukup memadai dan sangat representatif untuk pelaksanaan kegiatan.

Setelah melakukan berbagai persiapan pelaksanaan pengabdian, melakukan komunikasi secara inten (terus menerus) melalui media sosial *WhatsApp* kepada pimpinan lembaga (PSM), terkait dengan kesiapan lokasi pengabdian mulai dari penentuan peserta, penentuan waktu, dan tempat kegiatan, termasuk terus berkoordinasi dengan Penmad Kabupaten Pangandaran.

Kepala Seksi Penmad Kantor Kementerian Agama yang juga sebagai sekretaris FKUB Kabupaten Pangandaran bersedia mengundang pada peserta dalam hal ini para guru Madrasah Aliyah yang ada di pesantren-pesantren, sementera penyediaan berbagai akomodasi yang diperlukan selama melaksanakan pengabdian, dilakukan oleh PSM sebagai tempat lokasi kegiatan, seperti penyediaan konsumsi (makan dan snack) terutama untuk peserta kegiatan pengabdian; dan berdasarkan kesepakatan bahwa pelaksanaan kegiatan disepakati tanggal 11-13 Agustus 2023, dengan melakukan tindak lanjut atas kegiatan tersebut satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan

Setelah proses persiapa matang, kemudian kegiatan pun dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PSM Sabilil Muttaqien Kabupaten Pangandaran dilaksanakan pada tanggal 11-13 Agustus 2023. Kegiatan dihadiri oleh para pengabdi, perwakilan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai tim teknis yang membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Juga dihadiri oleh unsur *stakeholder*, Ketua FKUB Kabupaten Pangandaran, yang juga sebagai yang membuka acara. Pimpinan Pesantren Sabilil Muttaqien Pangandaran, Pimpinan Yayasan Sabilil Muttaqin, dihadiri oleh para guru Madrasah Aliyah Berbasis Pesantren di Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 50 orang, yang sekaligus menjadi peserta dalam kegiatan ini. Mereka mewakili pesantren-pesantren yang ada di kabupaten pangandaran, seperti yang telah di jelaskan di atas. Adapun pelaksanaan kegiatan mengikuti *schedule of time* yang telah ditetapkan, yakni sebagai berikut:

Rundown Kegiatan Pengabdian:

Hari Pertama:

Waktu	Jenis Kegiatan	Pelaksana
12.00 – 13.00	Registrasi Peserta	Panitia
13.00 – 14.30	Pembukaan Pembacaan Kalam Ilahi - Sambutan Perwakilan Dosen Pengabdi	MC Petugas Dr. Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag
	- Sambutan Pipinan Pesantren PSM Sabilil Muttaqin	Ust Sahlan Husain
	- Sambutan Ketua FKUB Kabupaten Pangandaran dan Sekaligus Membuka Acara	KH Dadang Khoerumansah Petugas
	Do'a	
14.30 – 15.00	Break	Panitia
15.00 – 16.30	Materi Kebijakan Moderasi Beragama di Kabupaten Pangandaran	Kepala Kemenag Kab. Pangandaran Ketua FKUB Kab. Pangandaran

Hari Kedua:

Waktu	Jenis Kegiatan	Pelaksana
09.00 – 11.30	Materi Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Satuan Pendidikan (Madarsah Aliyah)	Dr. Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag
11.30 – 12.30	ISOMA	
12.30 – 14.30	Materi Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan Profil Pelajaran Rahmatan Lilalamin	Dr. Heri Hidayat, S.Sn, M.Pd.I
14.30 – 15.00	Penutupan	MC
15.00 – 15.30	Pembagian Sertifikat dan Makan Siang	Panitia

Tahapan Pelaporan

Tahap berikutnya adalah melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik laporan akademik, maupun laporan keuangan. Laporan akademik mengikuti template yang ditentukan oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sementara laporan keuangan mengikuti ketentuan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Adapun laporan keuangan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam laporan akademik.

3.2. Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak (*Stakeholders*) dalam PKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di PSM Sabilil Muttaqien Pangandaran bekerja sama dengan FKUB Kabupaten Pangandaran berlangsung melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta melibatkan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkait aspek administratif seperti surat izin dan perjanjian kerja sama. Selain itu, pengabdi juga melakukan studi pendahuluan dan koordinasi lapangan dengan FKUB, PSM Sabilul Muttaqien, serta Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran untuk memastikan kesiapan lokasi dan peserta. Setelah lokasi disepakati, pengabdi menyiapkan aspek teknis dan substansi kegiatan, yang berfokus pada peningkatan wawasan moderasi beragama bagi guru-guru Madrasah Aliyah berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran.

Pihak Terlibat	Peran dan Kontribusi
LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Koordinasi teknis, penyusunan proposal, administrasi, dan fasilitator kegiatan pengabdian.

FKUB Kabupaten Pangandaran	Mitra utama pelaksanaan, penyedia narasumber, dan dukungan formal dalam penguatan moderasi beragama.
Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM)	Tuan rumah pelaksanaan, penyedia fasilitas, konsumsi, serta dukungan logistik kegiatan.
Penmad Kemenag Kab. Pangandaran	Koordinasi peserta, dukungan institusional, serta partisipasi dalam pembukaan kegiatan.
KKM-MA Kabupaten Pangandaran	Koordinasi antar madrasah, mobilisasi peserta dari masing-masing MA berbasis pesantren.
Guru-guru MA berbasis pesantren (peserta)	Sasaran utama kegiatan, sekaligus aktor strategis penyebaran nilai moderasi beragama dalam pendidikan.
Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati	Tim teknis lapangan dan dokumentasi kegiatan.

Peningkatan wawasan moderasi beragama bagi guru Madrasah Aliyah berbasis pesantren merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat peran strategis mereka dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi kepada peserta didik melalui proses pembelajaran [16]. Oleh karena itu, pengabdian ini difokuskan pada penguatan pemahaman guru terhadap prinsip moderasi beragama. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, diawali dengan pembukaan serta penyampaian materi oleh pimpinan FKUB dan pesantren mengenai urgensi sikap moderat dalam konteks keagamaan. Hari kedua diisi dengan pelatihan oleh dosen pengabdi mengenai implementasi pendidikan moderasi beragama di madrasah, termasuk penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamin* (P2RA). Kegiatan ini diikuti oleh 50 guru dari enam MA berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran, yaitu MA Al-Furqon Cimerak, MA YPK Cijulang, MA YPP Jamanis, MA Assyifa Padaherang, MA Mafatihul Huda Padaherang, dan MAN 2 Pangandaran. Seluruh madrasah tersebut berada di lingkungan pondok pesantren yang menjadi basis utama pembinaan keagamaan para peserta didik.

Madrasah	Jumlah Peserta	Keterangan
MA Al-Furqon Cimerak	8 orang	Guru PAI
MA YPK Cijulang	9 orang	Guru PAI
MA YPP Jamanis	7 orang	Guru PAI
MA Assyifa Padaherang	8 orang	Guru PAI
MA Mafatihul Huda Padaherang	10 orang	Guru PAI
MAN 2 Pangandaran	8 orang	Guru PAI
Total	50 orang	Seluruh peserta adalah guru PAI MA berbasis pesantren

Pendidikan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada komitmen pimpinan lembaga (*top manager*) dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari para santri dan siswa. Komitmen ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten agar moderasi beragama menjadi bagian dari budaya sekolah, bukan sekadar konsep teoritis [17]. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mendukung hal ini adalah strategi *insersi* nilai-nilai moderasi ke dalam seluruh mata pelajaran, selain upaya pengembangan moderasi sebagai mata pelajaran tersendiri [18].

Peran guru juga sangat penting dalam proses ini. Guru menjadi ujung tombak dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi secara kontekstual dan relevan dalam pembelajaran. Pendekatan insersi terbukti mampu menanamkan nilai-nilai tersebut secara menyeluruh kepada siswa, karena mengalir secara alami melalui berbagai mata pelajaran. Lebih jauh, penyediaan ruang khusus berupa mata pelajaran tersendiri juga dapat memperkuat pemahaman siswa secara sistematis terhadap prinsip-prinsip moderasi [16]. Kombinasi kedua pendekatan ini diyakini mampu membentuk ekosistem pendidikan yang kondusif bagi tumbuhnya generasi moderat dan toleran.

Selain strategi kurikuler, dukungan buku-buku pembelajaran yang memuat konten moderasi beragama juga berperan penting dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan keseimbangan kepada siswa. Keteladanan dari guru dan seluruh stakeholder madrasah menjadi faktor krusial dalam implementasi pendidikan moderasi, sebab guru berperan sebagai role model utama dalam proses pendidikan karakter.

Selama dua hari pelaksanaan pengabdian, peserta mendapatkan materi substantif yang disampaikan oleh pimpinan FKUB, pimpinan Pesantren Sabilil Muttaqin, serta dosen pengabdi. Materi pertama membahas pentingnya sikap moderat dalam konteks pesantren yang santrinya berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan mazhab yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa heterogenitas internal lembaga pendidikan keislaman membutuhkan pendekatan yang inklusif dan toleran.

Materi selanjutnya disampaikan oleh FKUB Kabupaten Pangandaran yang menekankan pentingnya sikap keberagamaan moderat dalam menghadapi arus deras informasi keagamaan di media sosial. Dalam konteks masyarakat Pangandaran yang majemuk, nilai moderasi beragama dipandang sebagai solusi utama dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. Hal ini sejalan dengan pandangan Ballianie et al. (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan moderasi harus ditanamkan secara sistematis di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta [19].

Dosen pengabdi juga menekankan bahwa penguatan moderasi beragama akan lebih efektif jika dilakukan melalui institusi pendidikan formal dan nonformal. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai dalam proyek Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P2RA) menjadi pendekatan strategis yang perlu terus diinternalisasikan dalam lingkungan satuan pendidikan.

Hari	Sesi	Materi	Narasumber
Hari 1	Sesi 1	Urgensi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam	Pimpinan PSM & Ketua FKUB
Hari 1	Sesi 2	Sikap Moderasi dalam Konteks Masyarakat Heterogen di Pangandaran	FKUB Kabupaten Pangandaran
Hari 2	Sesi 3	Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah	Dr. Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag
Hari 2	Sesi 4	Integrasi P5 dan P2RA sebagai Basis Pendidikan Moderasi di Sekolah	Dr. Heri Hidayat, M.Pd.I

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama dua hari, sebagaimana tertera dalam jadwal di atas. Dilaksanakan Pesantren Sabilill Muttaqien Pangandaran, karena pelaksanaannya dikerjasamakan dengan FKUB dan Pesantren Sabilil Muttaqin Pangandaran. Pelaksana pengabdian dititik beratkan pada workshop tentang wawasan moderasi beragama, dan implementasinya dalam lembaga pendidikan Islam. Sebagai bagian dari pendekatan *Community-Based Participatory Research* (CBPR), kegiatan pengabdian ini dilengkapi dengan tahapan evaluasi yang dirancang untuk mengukur efektivitas proses dan hasil kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk:

a. Evaluasi Proses (*Formative Evaluation*):

Dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, mencakup observasi langsung oleh tim pengabdi terhadap partisipasi peserta, keterlibatan aktif dalam sesi diskusi, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta. Tim teknis juga mendokumentasikan respons peserta melalui catatan lapangan dan sesi tanya jawab.

b. Evaluasi Akhir (*Summative Evaluation*):

Pada akhir kegiatan pengabdian, dilakukan pengumpulan data evaluasi melalui kegiatan dengan berbagai cara, di antaranya:

- Formulir umpan balik peserta untuk menilai kepuasan terhadap materi, narasumber, fasilitasi, dan relevansi program.

- Wawancara singkat (post-activity reflection) dengan beberapa peserta secara purposif untuk mendalami persepsi dan dampak langsung kegiatan terhadap pemahaman mereka tentang moderasi beragama.
- Diskusi penutup dengan stakeholder (pihak FKUB dan Pimpinan PSM) untuk menilai keberlangsungan dampak kegiatan di lingkungan pesantren dan madrasah masing-masing.

Meskipun kegiatan ini bersifat non-kuantitatif, evaluasi reflektif dan kualitatif menunjukkan indikasi kuat adanya peningkatan wawasan peserta tentang moderasi beragama, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan berikut:

Indikator Peningkatan	Temuan Selama dan Setelah Kegiatan
Peningkatan pemahaman konseptual	Peserta mampu menyebutkan kembali definisi, prinsip dasar, dan urgensi moderasi beragama dalam konteks pendidikan setelah sesi materi selesai.
Peningkatan kesadaran akan peran strategis guru	Sebagian besar peserta menyampaikan bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen moderasi di madrasah.
Komitmen integrasi nilai moderasi dalam pembelajaran	Beberapa guru menyampaikan rencana untuk mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam mata pelajaran seperti Fikih, SKI, dan Akidah Akhlak melalui metode insersi.
Keterbukaan terhadap pendekatan lintas perspektif	Peserta menunjukkan antusiasme dalam menerima contoh implementasi nilai toleransi, keadilan, dan anti-ekstremisme dari konteks pendidikan dan sosial yang lebih luas.
Penguatan jejaring antar madrasah	Terbangunnya komunikasi antar peserta lintas madrasah untuk kemungkinan kerja sama selanjutnya dalam mengembangkan materi atau program sejenis.

Berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan wawasan dan kesadaran guru-guru Madrasah Aliyah berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama. Program ini bukan hanya memberi penguatan konseptual, tetapi juga membangun komitmen praktis peserta untuk menginternalisasikan nilai-nilai moderasi dalam lingkungan pendidikan mereka.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan wawasan moderasi beragama bagi guru-guru Madrasah Aliyah berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran. Guru memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga moderat dalam beragama. Oleh karena itu, peningkatan wawasan moderasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan harus dilakukan secara terus-menerus agar mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan [20]. Guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang moderasi akan lebih mampu mengarahkan pembelajaran yang seimbang, toleran, dan kontekstual bagi peserta didik [21].

Penguatan moderasi beragama tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung nilai toleransi dan harmoni [22]. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan profesional lainnya harus menjadi prioritas untuk memastikan nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi secara efektif dalam pembelajaran. Hal ini penting untuk menciptakan pendidikan yang relevan dengan realitas sosial yang beragam dan mampu mencetak generasi yang adil dan siap hidup dalam masyarakat multikultural [23] [24].

Temuan kegiatan pengabdian ini menunjukkan konsistensi yang kuat dengan hasil penelitian sebelumnya. Rusmiati *et al.* (2022) menemukan bahwa komunitas pesantren merespons dengan antusias materi moderasi beragama, khususnya ketika disampaikan dalam format yang kontekstual dan komunikatif [9]. Demikian pula, Risdianto dan Arum (2022) melaporkan bahwa masyarakat pesantren merespons positif program penguatan moderasi beragama yang berbasis pada pendekatan lokal dan partisipatif [13]. Dalam konteks pendidikan, Ballianie *et al.* (2023) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam sistem pembelajaran formal merupakan strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dulu [19]. Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa guru berperan sebagai aktor strategis dalam pengarusutamaan nilai moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memperkuat hasil studi-studi terdahulu, tetapi juga memperluas cakupannya dengan menjadikan guru-guru Madrasah Aliyah berbasis pesantren sebagai fokus utama serta menerapkan pendekatan kolaboratif antara akademisi dan komunitas lokal sebagai strategi implementasinya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa workshop penguatan wawasan moderasi beragama selama dua hari terhadap 50 guru Madrasah Aliyah berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran menunjukkan hasil yang positif. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan pemahaman yang meningkat terhadap nilai-nilai moderasi beragama, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi kualitatif berupa refleksi peserta dan diskusi akhir kegiatan. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan kegiatan, yakni untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru sebagai agen moderasi dalam satuan pendidikan Islam. Program ini juga memperkuat temuan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa guru memiliki peran strategis dalam pengarusutamaan nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah [18] [17].

Meski demikian, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti cakupan wilayah yang masih terbatas pada satu kabupaten, durasi pelaksanaan yang relatif singkat, serta belum dilakukan evaluasi kuantitatif berbasis instrumen pengukuran yang terstandar. Oleh karena itu, prospek pengembangan kegiatan ini terbuka luas, baik melalui replikasi model pelatihan serupa di wilayah lain, pengembangan modul pembelajaran moderasi beragama berbasis madrasah, maupun penguatan studi longitudinal untuk mengukur perubahan sikap guru dan peserta didik pasca intervensi. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap literatur pendidikan Islam dan penguatan moderasi beragama dengan menawarkan pendekatan partisipatoris berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi guru-guru Madrasah Aliyah berbasis pesantren di Kabupaten Pangandaran. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kemenetraian Agama, MKMA, dan FKUB Kabupaten Pangandaran, serta terkhusus kepada PP Sabilil Muttaqin yang telah bersedia menjadi tempat dilaksanakannya pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. R. M. Tilaar, *The Power of Jamu: Kekayaan dan Kearifan Lokal Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- [2] F. H. Akbar, F. Lailatul Fasha, dan F. Abdullah, “The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith,” *Bulletin of Islamic Research*, vol. 2, no. 1, hlm. 59–80, Jun 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.21.
- [3] A. Muhtarom, *Moderasi Beragama dalam Pribumisasi Pendidikan Islam*. Teras Karsa Publisher, 2021.
- [4] Husnah. Z. Husna, “Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran Sebagai Solusi Terhadap Sikap Intoleransi,” *AL-MUTSLA*, vol. 4, no. 1, hlm. 41–53, Jul 2022, doi: 10.46870/jstain.v4i1.202.
- [5] K. Nidhom, “Pandangan AL-Qur'an dan As-Sunnah Tentang Wasatiyyah (Moderasi) serta Implementasinya Terhadap Hukum Islam,” *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, vol. 2, no. 2, hlm. 67–86, Jan 2023, doi: 10.51875/attaisir.v2i2.90.
- [6] F. D. Ixfina, “Harmoni Kebinekaan; Peran Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam,” *At-Ta'ib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 1, no. 01, hlm. 25–38, 2024, doi: <https://doi.org/10.63230/attadib.v1i01.168>.
- [7] M. H. Mutawakkil, “Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib,” *UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2021.
- [8] I. B. A. A. Wiguna dan I. A. M. Y. Andari, “Moderasi Beragama Solusi Hidup Rukun di Indonesia,” *Widya Sandhi Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*, vol. 14, no. 1, hlm. 40–54, Mei 2023, doi: 10.53977/ws.v14i1.949.
- [9] E. T. Rusmiati, M. A. H. Alfudholli, A. Shodiqin, dan T. Taufiqurokhman, “Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren untuk Mencegah Tumbuhnya Radikalisme,” *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, hlm. 203–213, Agu 2022, doi: 10.32509/abdimoestopo.v5i2.2162.
- [10] L. Fajariyah dan A. Halim, “Tafsir Islam Moderat di Media Sosial: Revitalisasi Syiar dan Kontestasi Narasi,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, vol. 13, no. 2, hlm. 191–217, 2023, doi: <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2023.13.2.191-217>.

- [11] D. N. Tuasuun dan D. Hapsarani, "Memperkenalkan Keberagaman Agama Melalui Bacaan Anak di Taman Bacaan Pesantren Nanggerang," *Prosiding Simposium Pengabdian Masyarakat Humaniora*, hlm. 14–21, 2023.
- [12] M. R. Fitrotulloh, M. Amiruddin, dan A. M. Firdaus, "Revitalisasi Toleransi Beragama Perspektif Psikologi Multikultural (Studi Kasus SDN 1 Desa Balun Kabupaten Lamongan)," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 14, no. 1, hlm. 96–112, Nov 2024, doi: 10.36835/hjsk.v14i1.4276.
- [13] F. Risdianto dan I. M. Arum, "Penguatan Moderasi Beragama dan Toleransi Melalui 'Quotes' di Kampung Mrican, Gendongan, Tingkir, Salatiga," *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 2, hlm. 561, Jun 2022, doi: 10.20527/btjpm.v4i2.5152.
- [14] M. Jacky, *Praktik KKN Tematik MBKM Metode Pemberdayaan PAR, ABCD, CBPR, BMC dan 4D*. Surabaya: UNESA University Press, 2021.
- [15] M. Ansori, A. Afandi, R. D. Fitriyah, R. Safriyani, dan H. Farisia, *Pendekatan-Pendekatan dalam University-Community Engagement*. UIN Sunan Ampel Press, 2021.
- [16] S. AR, "Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama," *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, vol. 3, no. 1, hlm. 37–51, Mar 2020, doi: 10.36835/al-irfan.v3i1.3715.
- [17] H. Rosyada, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di Sekolah," *Al-Khos: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 2, no. 2, hlm. 55–64, Des 2022, doi: 10.62808/al-khos.v2i2.65.
- [18] A. Minarni, "Peran Guru Agama Islam dalam Menanamkan Moderasi Beragama," *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 1, no. 1, hlm. 64–73, 2021.
- [19] N. Ballianie, M. Dewi, dan S. Syarnubi, "Internalisasi Pendidikan Karakter pada Anak dalam Bingkai Moderasi Beragama," dalam *International Education Conference (IEC) FITK*, 2023, hlm. 44–52.
- [20] A. A. Harismawan, H. Ikmal, dan N. E. P. Muchtar, "Implementasi dan Pembentukan Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 19, no. 1, hlm. 58–73, 2023, doi: <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v19i1.238>.
- [21] U. Nasri dan M. Tabibuddin, "Paradigma Moderasi Beragama: Revitalisasi Fungsi Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural Perspektif Pemikiran Imam al-Ghazali," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, vol. 8, no. 4, hlm. 1959–1966, Okt 2023, doi: 10.29303/jipp.v8i4.1633.
- [22] A. R. Afendi dan K. Ed Saleh, "Pendidikan Islam Perspektif Moderasi Sosio-Religius dalam Beragama dan Bernegara," 2022, *Rajawali Pers; Depok*.
- [23] H. Harmi, "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, vol. 7, no. 2, hlm. 228–234, 2022.
- [24] K. Anwar, "Moderasi Beragama: Sebuah diskursus dinamika keagamaan di era kontemporer," 2023, *K-Media*.